

Keterwakilan Politik Anggota Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa Sanur Kauh Periode 2013 – 2019

I Nyoman Adi Jaya Prawira¹⁾, Bandiyah²⁾, Muhammad Ali Azhar³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : adijayaprananta@gmail.com¹⁾, dyah_3981@yahoo.co.id²⁾, aliazhar23mr@yahoo.co.id³⁾

ABSTRACT

This study aims to answer the formulation of the problem, namely how is the political representation of women members in the Village Consultative Body in Sanur Kauh Village for the period 2013 - 2019. This study uses Political Presence Theory and Representation Theory. The research method used is a qualitative method. The results of this study indicate that first the Political Presence of BPD Women Members has been fulfilled descriptively. Both are substantively fulfilled but there are obstacles where not all aspirations are realized. Third, personal transformation has not been fulfilled where BPD Perempuan members have not made significant changes to women in Sanur Kauh Village, but are able to make changes personally. Fourth, formal, symbolic and substantive representations have been fulfilled, while descriptive representations have not been fulfilled because female BPD members have not been able to represent all female characters in Sanur Kauh Village.

Keyword: Women's Political Representation, Village Consultative Body, Sanur Kauh Village.

1. PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi dan kewenangan yaitu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Sehingga keanggotaan BPD perlu memperhatikan keterwakilan semua unsur masyarakat, termasuk perempuan. Adanya semua unsur dari masyarakat desa dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dalam observasi yang penulis lakukan di Badan Pemerdaya Desa Provinsi Bali, hanya terdapat beberapa keterwakilan

perempuan dalam keanggotaan BPD di Desa – Desa Kota Denpasar sebelum munculnya aturan keterwakilan perempuan. Anggota BPD perempuan tersebut berasal dari Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan yang berjumlah 3 orang dari total 11 orang atau hampir 30% dari anggota BPD di desa tersebut pada periode (2007-2013) dan (2013-2019). Selama menjabatnya 3 anggota BPD perempuan tersebut, pada periode pertama tahun 2007 – 2013, belum bisa banyak berbicara karena anggaran desa pada saat itu masih sedikit dan juga masih sangat kuatnya dominasi anggota BPD laki – laki baik dalam partisipasi maupun keaktifan pada saat rapat – rapat di desa. Pada periode kedua menjabatnya 3 anggota BPD

perempuan tersebut, juga belum banyak mengalami perubahan karena dominasi dari anggota BPD laki – laki. Walaupun desa sudah mulai memperoleh alokasi dana desa dari pemerintahan pusat, akan tetapi aspirasi dari anggota BPD perempuan belum mendapat prioritas.

BPD Desa Sanur Kauh merupakan salah satu BPD yang pertama kali terdapat keterwakilan perempuan dan menjadi yang paling banyak keterwakilan perempuan yaitu 3 orang. Oleh karena itu menarik untuk mengetahui bagaimana perjuangan dan dampak hadirnya anggota perempuan tersebut terhadap kondisi perempuan di Desa Sanur Kauh serta proses dan alasan terpilihnya perempuan menjadi anggota BPD. Selain itu alasan lain penulis tertarik meneliti pada parlemen tingkat desa atau BPD karena desa memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terutama dalam penguatan pondasi demokrasi. Sehingga dalam membangun sistem apapun di Indonesia maka harus dimulai dari sistem di pemerintahan desa, karena hampir 70% wilayah di Indonesia terdiri dari desa.

2. KAJIAN PUSTAKA

Beberapa penelitian terkait keterwakilan perempuan di tingkatan desa masih sangat sedikit dikaji, oleh karena itulah penulis menyertakan penelitian yang terkait dengan keterwakilan perempuan dalam jabatan politik baik dari pusat sampai tingkatan paling bawah serta yang membahas tentang perempuan dan desa. Ada beberapa penelitian lain yang sudah dilakukan dapat digunakan sebagai acuan

maupun referensi dari penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang sudah ada, penulis mengambil tiga sampel penelitian sebagai sumber maupun tambahan referensi untuk penelitian ini.

Pertama yaitu penelitian skripsi Feybe M.P Wuisan “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009 - 2014)”. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa penemuan yaitu, rendahnya tingkat partisipasi kaum perempuan menjadi anggota legislatif dipengaruhi oleh rendahnya wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik, selain itu dipengaruhi oleh masih kuatnya budaya patriarki yang telah melekat bagi setiap anggota DPRD laki - laki sehingga seringkali dalam proses persaingan untuk memperoleh/meraih jabatan strategis dalam bidang politik kaum wanita jauh tertinggal.

Lalu yang kedua adalah jurnal analisis kebijakan yang berjudul “Menilik Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Bingkai Demokrasi Komunitarian Desa : Ihwal Representasi Perempuan dalam BPD” oleh Any Sundari dan Rusman Nurjaman tahun 2016. Dalam jurnal ini membahas tentang dampak dari diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah membuka kesempatan bagi proses pendalaman demokrasi komunitarian desa dan juga peluang dari kiprah kepemimpinan perempuan di ranah desa.

Ketiga yaitu skripsi tentang peran BPD perempuan dalam pembangunan desa di desa Gunung Tumpeng dan Desa Bantal. Berdasarkan perbandingan peran anggota

BPD Perempuan dalam pembangunan desa di desa Gunung Tumpeng dan desa Bantal, memperlihatkan perbedaan jumlah anggota BPD perempuan juga menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya keaktifan anggota BPD perempuan dalam proses pembangunan desa.

Penulis mbingkai penelitian ini menggunakan teori *politic presence* dari Anne Philips dan teori representasi dari Hanna Pitkin.

TEORI POLITIC PRESENCE

Teori ini pertama kali diperkenalkan Oleh Anne Philips pada tahun 1995 dalam buku yang berjudul *The Politic of Presence*. Perempuan menurut Anne Philips memiliki kelengkapan yang terbaik untuk mewakili kepentingan perempuan dalam ranah politik. Masuknya perempuan di dalam struktur politik diperlukan untuk memberi perempuan kekuatan politik di masyarakat. Philips membagi kehadiran tersebut menjadi 3 sifat yaitu deskriptif, substantif dan transformasi personal. Kehadiran deskriptif mengacu kepada kehadiran fisik perempuan di dalam lembaga politik, ekonomi, dan sosial. Kehadiran mereka menjadi simbol perempuan ada di lembaga tersebut sesuai ketentuan kuota. Sedangkan kehadiran substantif adalah kehadiran wakil perempuan berusaha sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang - orang yang diwakilinya. Sementara itu, transformatif secara personal adalah dampak dari kehadiran tersebut pada diri, identitas, sistem penciptaan makna, dan pandangan dunia. Dengan kata lain kehadiran transformatif ini

memiliki pengaruh untuk mengubah diri mereka, peran mereka dan mengembangkan kapasitas mereka dalam menjalankan fungsi kehadirannya.

TEORI REPRESENTASI

Dalam bahasa yang sederhana, representasi atau perwakilan politik ini dapat dipahami sebagai relasi antara seorang wakil dengan yang diwakili, berbasiskan kepentingan- kepentingan (baik wakil maupun yang terwakili), di dalam konteks politik tertentu (Marijan, 2011). Hanna Fenichel Pitkin pada tahun 1969 mengemukakan bahwa representasi adalah layak dalam politik modern.

Dalam konsepsi Pitkin, representasi dibedakan dalam empat kategori, pertama representasi formal (*formalistik representation*), Representasi formal dipahami sebagai perwakilan politik yang berlangsung di dalam lembaga - lembaga perwakilan formal (seperti parlemen). Kedua representasi substantif (*substantif representation*), Representasi substantif dipahami sebagai model representasi di mana seorang wakil bertindak untuk (acts for) mereka yang diwakili. Ketiga representasi deskriptif (*descriptif representation*), Sedangkan representasi deskriptif dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang wakil berdiri untuk (stands for) orang - orang yang secara objektif serupa. Keempat representasi simbolik (*simbolik representation*), jika wakil berdiri untuk (stands for) mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan

kebudayaan, maka ini adalah representasi simbolik.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendapatkan data yang mendalam, serta menggambarkan, menganalisa dan menghasilkan temuan. Lokasi penelitian ini di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dimana unit analisisnya adalah anggota perempuan BPD Desa Sanur Kauh.

Dalam menentukan narasumber penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling dimana ditentukan berdasarkan yang paling mengetahui tentang apa yang diteliti dan diharapkan penulis sehingga memudahkan penulis dalam menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam mengumpulkan data penelitian penulis menggunakan cara wawancara, observasi serta dokumentasi. Dalam proses analisis data diawali dengan menggunakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, lalu dianalisis dari yang bersifat umum ke spesifik, setelah itu dilakukan abstraksi data kemudian mencari makna – makna yang ditemukan di lapangan, lalu diformat ke narasi deskriptif dan diinterpretasikan sesuai analisa serta terakhir menghasilkan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

ALASAN DAN PROSES KETERPILIHAN ANGGOTA BPD PEREMPUAN

Salah 1 dari 3 anggota BPD perempuan itu adalah Ibu Kembar Arini.

Beliau adalah salah satu anggota perempuan dalam BPD yang dipercaya oleh masyarakat Desa Sanur Kauh dalam mewakili suara masyarakat terutama yang menyangkut kesejahteraan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kembar Arini dapat dilihat bahwa alasan dan motivasinya menjadi anggota BPD Desa Sanur Kauh adalah karena beliau dipercaya oleh masyarakat di banjar/dusun, mungkin karena dilihat aktif dalam berbagai kegiatan yang melibatkan perempuan di banjar dan desa. Selain itu Ibu Kembar juga mempunyai keinginan memperjuangkan hak - hak perempuan di desa dan juga mengatasi berbagai permasalahan terkait perempuan, karena biasanya hanya perempuan yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan, jika laki - laki yang mewakili perempuan tentu tidak mengakomodir penuh apa yang dibutuhkan oleh perempuan. Ibu Kembar melihat sebelum dirinya dan teman - teman perempuan hadir di BPD, program-program untuk perempuan dari desa tidak ada sama sekali selain posyandu yang merupakan program wajib dari pemerintah pusat. Selain menjadi anggota BPD, Ibu Kembar Arini juga bekerja menjadi kepala Koperasi Dhana yang dimiliki oleh Banjar Dangin Peken Desa Sanur Kauh. Ibu Kembar Arini juga aktif dalam pengurus PKK di banjar sejak awal menikah.

Ibu Kembar sendiri dipilih sebagai BPD Perempuan dari Banjar Dangin Peken, dimana salah satu yang memilih beliau adalah Bapak Made Sukerena. Beliau sebagai kelian adat Banjar Dangin Peken

memberi penjelasan kenapa memilih Ibu Kembar karena melihat sosok perempuan paling banyak mengerjakan dan menyelesaikan urusan di rumah tangga. Di Banjar Daging Peken sistem gender itu tidak berlaku, setiap orang, baik laki - laki ataupun perempuan dihargai disana. Sebagai contohnya dalam mebanjar adat, perempuan disana yang menikah dengan orang luar dari banjar Daging Peken diperbolehkan mebanjar adat disana. Hal tersebut dikarenakan di banjar tersebut menganut sistem "Gede Rembug" pertalian darah, dimana setiap orang, baik laki - laki atau perempuan berhak untuk tinggal disana, sehingga tidak akan menyebabkan keterlantaran seperti yang ada di media - media saat ini, jadi perempuan tersebut dilindungi di Banjar Daging Peken. Ini berlaku juga untuk perempuan asli banjar daging peken yang bercerai atau janda, tetap diterima bila ingin kembali kesini dan mebanjar adat disini, sehingga posisi perempuan tersebut menjadi purusa (istilah laki - laki di bali).

Dalam hal terpilihnya Ibu Kembar menjadi anggota BPD yang mewakili Banjar Daging Peken, itu atas dasar pilihan karma banjar yang hadir pada saat sangkep (rapat). Selain sebagai seorang perempuan Ibu Kembar juga sudah mengabdikan lama di koperasi dana dibawah naungan Banjar Daging Peken, dari awal koperasi dana terbentuk dipercaya menjadi kepala koperasi hingga saat ini. Disamping itu juga suami Ibu Kembar merupakan salah satu prajuru banjar dan selain itu juga merupakan tokoh di banjar ini, dari segi

ekonomi beliau sudah mapan sehingga tidak akan mencari keuntungan pribadi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kelian Adat Daging Peken, adapun proses pemilihan BPD yaitu pertama, pemerintahan desa membentuk panitia pemilihan anggota BPD yang diambil dari tokoh masyarakat/adat di Desa Sanur Kauh, mereka terdiri dari 11 orang, yang merupakan perwakilan dari 11 banjar yang ada di Desa Sanur Kauh. Setelah itu mereka melakukan proses pemilihan di banjar masing-masing. Di Banjar Daging Peken sendiri pada saat itu, diadakan sangkep/rapat yang dihadiri oleh prajuru banjar adat dan seluruh krama lanang/kepala keluarga laki - laki untuk pemilihan anggota BPD tersebut. Mengingat begitu penting dan vitalnya posisi tersebut, karena peran dan fungsinya sama seperti DPR, tentu beliau sangat hati - hati dan memikirkan dengan matang siapa yang layak menjadi calon anggota BPD. Dari beberapa krama yang mengajukan diri dan yang diajukan, akhirnya ada 4 calon yang terpilih, terdiri dari tiga krama laki - laki dan satu krama perempuan, yang diajukan oleh beberapa krama laki - laki. Setelah itu rapat dilanjutkan pada minggu depan dengan menghadirkan ke 4 calon serta menyampaikan visi dan misinya, setelah mereka menyampaikan visi dan misinya, kami selaku prajuru (pengurus banjar adat) memilih Ibu Kembar.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa terpilihnya Ibu Kembar dan yang lain menjadi anggota BPD Perempuan di Desa Sanur Kauh selain karena motivasi mereka untuk memperjuangkan aspirasi

perempuan juga tidak terlepas dari peran laki – laki yang memberikan kepercayaan untuk memilih mereka. Disamping karena pengalaman, pekerjaan dan pendidikan mereka, peran laki – laki sebagai suami mereka juga turut mempengaruhi keterpilihan mereka.

PARTISIPASI DAN KINERJA ANGGOTA BPD PEREMPUAN DESA SANUR KAUH

Biasanya masyarakat secara umum di banjar - banjar Desa Sanur Kauh menyampaikan aspirasi mereka melalui kelian banjar ataupun menyampaikan langsung pada saat musyawarah desa yang diselenggarakan. Untuk perempuan sendiri, Ibu Kembar selaku BPD menyerap dan mendengar aspirasi mereka pada saat arisan PKK di banjar yang setiap bulan diadakan. Sebelum Ibu Kembar dan teman - teman perempuan yang lain menjadi anggota BPD, sangat jarang sekali anggota BPD, dimana sebelumnya yang didominasi laki - laki, mendengarkan dan menyerap aspirasi perempuan disini. Anggota BPD laki - laki biasanya mendengar dan menyerap aspirasi dari kelian adat saja ataupun saat sangkep (rapat) banjar, dimana kelian adat sudah pasti laki - laki dan yang hadir pada saat rapat - rapat di banjar adalah laki - laki yang menjadi kepala keluarga. Jadi diperlukan anggota BPD perempuan seperti Ibu Kembar untuk mengimbangi aspirasi masyarakat yang terkait kesejahteraan perempuan seperti program PKK, Posyandu dan kesehatan anak.

Untuk program - program perempuan yang berhasil diwujudkan pada tahun 2017 ada 7 program berdasarkan aspirasi dari perempuan yang diterima yaitu pelatihan merias wajah, pelatihan mesanggul bali, pelatihan merangkai bunga, pembinaan pola asuh anak, sosialisasi penghapusan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), pelatihan membuat masakan ayam betutu, dan sosialisasi kewirausahaan dari 7 program tersebut 3 diantaranya dari aspirasi perempuan di Banjar Daging Peken yang diwakili Ibu Kembar.

BPD di Desa Sanur Kauh melakukan rapat sebanyak 1 - 6 kali dalam sebulan, tergantung kegiatan yang akan berjalan. Jika terdapat agenda musyawarah desa, rapat bisa sampai 6 kali rapat selama sebulan. Menurut Bapak Gusi Made Gede selaku Ketua BPD Sanur Kauh dimana secara umum kehadiran anggota BPD perempuan sudah cukup baik, hanya Ibu Kadek Suparmi saja yang jarang hadir saat rapat dan kegiatan BPD dikarenakan kesibukannya di kegiatan lain. Menurut Ibu Kadek Suparmi sendiri jarang nya beliau datang saat rapat karena kesibukannya pada kegiatan di IODI (Ikatan Olahraga Dancesport Indonesia) yang biasanya persiapannya bisa mencapai sebulan dan dilakukan di luar kota. Dari segi keaktifan saat rapat dan kegiatan BPD menurut Bapak Gusi ketiga anggota BPD perempuan tersebut sudah cukup baik, terutama Ibu Kembar Arini.

Dalam keaktifan anggota BPD Perempuan tersebut, menurut Bapak Gusi selaku ketua BPD Sanur Kauh keaktifan dari ketiga anggota BPD perempuan sudah

cukup baik, terutama Ibu Kembar yang paling aktif dalam berbagai kegiatan dan rapat – rapat baik dalam internal BPD maupun di Desa Sanur Kauh. Dari pengakuan ketiga perempuan anggota BPD Sanur Kauh juga selalu aktif memberi masukan pada saat rapat – rapat, mulai dari rapat internal BPD, musyawarah desa, musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan rapat yang lainnya.

Selain partisipasi dan aspirasi yang telah dilakukan oleh anggota BPD perempuan di Desa Sanur Kauh, tentu tidak lepas dari hambatan selama memperjuangkan kepentingan perempuan. Salah satu anggota BPD perempuan yaitu Ibu Kadek Suparmi mengatakan hambatan yang dialami yaitu saat pelaksanaan program pelatihan merias wajah dan mesanggul bali, itu pengajuannya sudah dari tahun 2015, yang harusnya terealisasi tahun 2016 akan tetapi baru terealisasi tahun 2017. Hal tersebut dikarenakan mayoritas anggota BPD Sanur Kauh yaitu laki – laki lebih memprioritaskan program lain yang menurut mereka lebih penting. Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh anggota BPD perempuan yang lainnya yaitu Ibu Rasminiary dimana aspirasi yang disampaikan tidak bisa langsung dijalankan tahun depan, bisa menunggu 1 – 2 tahun baru bisa terealisasi. Seperti saat Ibu Rasminiary menyampaikan aspirasi perbaikan fasilitas tk yang dikelola oleh desa. Itu diajukan tahun 2017, dan baru mendapatkan prioritas untuk diajukan pada saat rapat dengan kepala desa tahun 2018. Oleh karena itu aspirasi dari perempuan yang diwakilkan oleh BPD Perempuan

memerlukan waktu yang lumayan lama karena adanya kepentingan prioritas program lain dari mayoritas peserta rapat yang didominasi oleh laki – laki.

Anggota BPD Perempuan tersebut bukannya tanpa perlawanan, mereka sering mengajukan masukan dan saran agar aspirasi tentang perempuan dapat lebih banyak yang terealisasi, seperti yang dikatakan oleh Ibu Kembar bahwa beliau sering berdebat dengan ketua BPD bahwa aspirasi dari perempuan yang diwakilkannya harusnya lebih banyak mendapatkan prioritas juga, akan tetapi karena dominasi anggota BPD laki – laki yang begitu besar baik dari jumlah dan keaktifan, beliau pun mengalah.

Proses pengajuan aspirasi dimulai dari masing – masing anggota BPD menyampaikan aspirasi yang disampaikan pada saat rapat BPD tentang program kerja yang akan dijalankan pada tahun depan. Lalu akan di ranking berdasarkan prioritas program tersebut. Penentuan prioritas itu berdasarkan musyawarah dengan seluruh anggota BPD. Dimana dilihat dari berapa banyaknya yang mendukung program tersebut dapat berjalan di tahun depan dan seberapa penting program tersebut. Jika tidak dicapai titik temu, akan dilakukan voting.

DAMPAK KEHADIRAN ANGGOTA PEREMPUAN DALAM BPD DESA SANUR KAUH

Dampak perubahan terhadap perempuan di Desa Sanur Kauh sendiri menurut salah satu anggota BPD perempuan yaitu Ibu Kembar sudah

berdampak seperti saat selesai program merias wajah, banyak ibu – ibu yang bisa merias sendiri, yang biasanya dilakukan di salon. Akan tetapi memang dampak yang lebih besar sampai membuka usaha tata rias dan merubah kondisi sosial perempuan tersebut belum, karena program tersebut tidak dapat hanya dilakukan sekali saja, melainkan harus berkelanjutan. Menurut Ibu Kembar disanalah kendalanya, karena program lanjutan tersebut tidak mendapatkan prioritas saat rapat BPD, jadinya diundur tahun depan atau bisa dua tahun lagi.

Selain itu juga tingkat partisipasi perempuan pada saat realisasi program tersebut menjadi kendala menurut Ibu Kembar karena ruangan tidak pernah sampai full dan yang hadir itu – itu saja. Menurut Ibu Kembar sendiri dan masukan dari perempuan di Desa Sanur Kauh hal itu karena masih banyak perempuan yang tidak bisa membagi waktu dengan urusan di rumah tangga, kehidupan sosial dan upacara adat istiadat. Sehingga mereka banyak yang tidak hadir pada saat realisasi program tentang perempuan, padahal Ibu Kembar dan Anggota BPD perempuan yang lain sudah menentukan tanggalnya agar tidak berbarengan dengan rahinan, hari baik orang nikah dan odalan di Pura – Pura Desa Sanur Kauh.

Selain sebagai anggota BPD secara pribadi anggota BPD perempuan tersebut juga memberi dampak terhadap perempuan di Desa Sanur Kauh seperti yang dilakukan Ibu Kembar yaitu memberikan masukan pada saat pertemuan pkk di banjar dan staff perempuan di koperasi dana agar

mereka lebih berani bersuara dan mengambil peluang yang datang. Beliau selalu mencontohkan dirinya sendiri agar dapat menginspirasi mereka. Selain itu di lingkungan keluarga sendiri beliau selalu memotivasi perempuan agar lebih mandiri dengan mampu bekerja dan tidak hanya mengandalkan laki – laki, untuk perempuan yang masih muda selalu diingatkan menyelesaikan pendidikan, paling minim S1. Hasilnya keluarga beliau yang perempuan selain yang bersekolah mampu bekerja atau berwirausaha.

Jadi dapat penulis simpulkan kehadiran anggota BPD Perempuan di Desa Sanur Kauh mampu menyalurkan dan merealisasikan aspirasi perempuan, juga mampu memberikan dampak secara pribadi terhadap perempuan, akan tetapi untuk dampak yang signifikan belum bisa terwujud yang salah satunya karena tidak adanya program yang berkelanjutan dari setiap program yang jalan tiap tahunnya serta partisipasi perempuan yang hadir pada saat realisasi program kurang maksimal. Namun secara pribadi anggota BPD perempuan tersebut mampu memberikan dampak perubahan terhadap perempuan di Desa Sanur Kauh.

PEMBAGIAN PERAN ANGGOTA BPD PEREMPUAN DI RUANG PRIVAT DAN PUBLIK

Pembagian peran anggota BPD Perempuan di ruang privat dan publik berdasar karena adanya pembagian area bagi kaum laki - laki dan kaum perempuan dalam dunia publik dan dunia privat, pembagian kerja dalam keluarga maupun

karir. Hal tersebut berdasarkan keinginan dari perempuan agar terbebas dari keadaan struktur sosial hirarki yang berkaitan dengan dibaginya ruang antara laki - laki dan perempuan, yang mana laki - laki berada dalam ruang publik sedangkan perempuan berada di ruang privat. Dari hasil temuan yang penulis dapat, disini anggota BPD perempuan Desa Sanur Kauh mampu melakukan hal tersebut sehingga bisa menjabat sampai dua periode (2007 – 2013) dan (2013 – 2019). Tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terwujud seperti dukungan keluarga, keinginan untuk membawa perubahan, dan yang lainnya.

Partisipasi perempuan dalam BPD dapat ditunjang terutama jika mendapatkan kondisi yang memadai serta dukungan dari anggota keluarga, karena berdasarkan pendapat dari Ibu Kembar Arini bahwa anak – anak sudah dapat mengurus dirinya sendiri karena sudah dewasa. Selain itu Ibu Kembar Arini juga mengatakan bahwa pekerjaan sebagai anggota BPD untungnya tidak selalu menuntut harus setiap hari pergi ke kantor dan menghabiskan banyak waktu, jadi menjadi anggota BPD dapat membagi waktu antara pekerjaan dan kewajiban beliau di rumah. Akan tetapi memang pada saat rapat - rapat yang membahas program desa, mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Desa (MusDes) yang banyak menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran. Sebagai seorang perempuan dan ibu, beliau biasanya meminta ijin ke suami dan orang rumah bahwa akan sibuk dan pulang telat, selama ini suami mengerti dan tidak pernah

protes tentang hal tersebut. Bahkan dukungan suami salah satunya yang mendorong Ibu Kembar untuk menjadi anggota BPD di Desa Sanur Kauh.

ANALISA TEMUAN

Anne Phillips membagi politic presence menjadi 3 sifat. Pertama bersifat deskriptif yaitu mengacu kepada kehadiran fisik perempuan di dalam lembaga politik, ekonomi, dan sosial. Kehadiran mereka menjadi simbol perempuan ada di lembaga tersebut sesuai ketentuan kuota. Hal ini sesuai dengan kehadiran perempuan dalam BPD di Desa Sanur Kauh, bukan hanya satu bahkan sampai tiga orang yang terpilih bukan hanya karena motivasi untuk memajukan perempuan saja, tapi ada faktor pendidikan, ekonomi dan pengalaman serta pengaruh dari suami mereka dalam keterpilihannya. Proses pemilihannya sendiri melalui musyawarah mufakat di masing – masing banjar di Desa Sanur Kauh yang didominasi oleh laki – laki.

Lalu yang kedua bersifat substantif, dimana kehadiran substantif adalah kehadiran dari wakil perempuan yang berusaha sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang - orang yang diwakilinya. Kehendak yang dimaksudkan dalam keterwakilan dari anggota BPD perempuan adalah aspirasi dari perempuan di Desa Sanur Kauh. Yang mana dalam penelitian ini sudah terpenuhi karena anggota BPD perempuan di Desa Sanur Kauh mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi perempuan, akan tetapi ada hambatan dimana anggota

BPD Perempuan tersebut tidak mendapatkan prioritas dalam realisasi aspirasi yang disampaikan. Hal tersebut dikarenakan masih kuatnya dominasi anggota BPD laki – laki dalam rapat pengajuan dan realisasi aspirasi, oleh karena itu harusnya anggota BPD laki – laki di Desa Sanur Kauh harus memberikan kesempatan yang sama untuk aspirasi tentang perempuan yang disampaikan oleh anggota BPD perempuan, selain itu perlu ada aturan dari pemerintah pusat agar kuota perempuan di BPD lebih ditingkatkan, paling tidak 50% dari keanggotaan BPD agar dapat mengakomodir kepentingan perempuan.

Sementara itu, transformatif secara personal adalah dampak kehadiran anggota BPD perempuan pada diri, identitas, sistem penciptaan makna, dan pandangan dunia perempuan bersangkutan. Sehingga dapat dikatakan kehadiran anggota BPD perempuan tersebut memberikan dampak yang dapat merubah tatanan sosial perempuan di Desa Sanur Kauh. Dalam penelitian ini penulis analisis bahwa anggota BPD perempuan belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap kondisi sosial perempuan di Desa Sanur Kauh sehingga sifat ini belum terpenuhi. Akan tetapi secara hadirnya anggota BPD perempuan tersebut setidaknya memberikan perubahan dari segi ada yang mewakili dan memperjuangkan aspirasi perempuan, selain itu juga dari program – program tentang perempuan yang berhasil direalisasikan memberikan perubahan pada beberapa perempuan di Desa Sanur Kauh.

Akan tetapi memang belum semua perempuan di Desa Sanur Kauh merasakan perubahan dari program yang dijalankan, karena kurangnya partisipasi perempuan pada realisasi kegiatan dan tidak adanya program yang berkelanjutan yang besumber dari tidak mendapatkan prioritas saat rapat aspirasi. Seharusnya partisipasi perempuan di Desa Sanur Kauh dalam realisasi program bisa lebih maksimal karena dampaknya juga terhadap perempuan tersebut. Selain itu juga secara pribadi anggota BPD perempuan tersebut melakukan perubahan pada diri perempuan di Desa Sanur Kauh, terutama di lingkungan keluarga dan pekerjaan.

Selain teori *politic presence*, penulis juga menganalisa penelitian ini dengan teori representasi dari Hanna Pitkin. Hanna Fenichel Pitkin pada tahun 1969 mengemukakan bahwa representasi dibedakan dalam empat kategori yaitu representasi formal, representasi substantif, representasi deskriptif, representasi simbolik.

Jenis representasi yang dikemukakan oleh Pitkin tersebut, pada dasarnya tidaklah berdiri sendiri, karena satu sama lain bisa saling berpadu dan berkaitan. Sangat mungkin model representasi deskriptif berkaitan dengan kedua jenis lainnya (substantif dan simbolik). Representasi formal sendiri dipahami sebagai perwakilan politik yang berlangsung di dalam lembaga - lembaga perwakilan formal (seperti parlemen), dalam penelitian yang penulis teliti yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan parlemen desa karena fungsinya menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat desa, oleh karena itu keterwakilan anggota perempuan di BPD Desa Sanur Kauh sudah memenuhi unsur representasi formal.

Representasi substantif sendiri dipahami sebagai model representasi di mana seorang wakil bertindak untuk mereka yang diwakili. Substantif disini dapat diartikan representasi yang mengedepankan bagaimana cara seorang wakil bertindak untuk yang diwakili bukan sekedar cara berdiri seseorang demi orang lain. Representasi substantif lebih berorientasi upaya memperjuangkan kepentingan suatu kelompok (Lovenduski, 2008). Perwakilan ini lebih melihat pada tindakan dan kebijakan yang dihasilkan oleh para wakil sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi kelompok kepentingan yang beragam. Jenis keterwakilan ini sama dengan jenis *politic presence* secara substantif dari Anne Philips yang menekankan pada tindakan atau perjuangan anggota BPD perempuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi perempuan di Desa Sanur Kauh, dimana sudah terpenuhi karena keberhasilan anggota BPD perempuan tersebut merealisasikan aspirasi dari perempuan yang diwakilkan. Hal tersebut sesuai dengan harapan dari model keterwakilan substantif, dengan bertambahnya jumlah perempuan di parlemen dapat memberikan perubahan yang cukup signifikan bagi perbaikan kelompok perempuan pada umumnya.

Sedangkan representasi deskriptif dipahami sebagai bentuk representasi di mana seorang wakil berdiri untuk orang -

orang yang secara objektif serupa. Serupa disini menurut konteks deskripsi yang merupakan ciri karakter terwakil, misalnya warna kulit, gender, maupun suku, serta kelas sosial. Kehadiran perempuan dalam lembaga perwakilan formal secara deskriptif memang mewakili kelompok perempuan, namun apakah hal tersebut otomatis menjadikannya bekerja untuk kelompok perempuan yang diwakilinya. Di sinilah dasarnya, bahwa representasi deskriptif tidaklah dipahami sebagai sesuatu yang diterima begitu saja. Maka dari itu, representasi deskriptif di sini diberi label pensifatan untuk memperlihatkan sejauh mana bekerjanya para anggota BPD perempuan di Desa Sanur Kauh untuk semua karakter perempuan disana. Dari temuan penelitian penulis, anggota BPD perempuan tersebut belum bisa mewakili semua karakter perempuan di Desa Sanur Kauh, hal ini dikarenakan perempuan yang terpilih menjadi anggota BPD di Desa Sanur Kauh berasal dari kelas sosial menengah dan atas, sehingga untuk kelas bawah belum terwakilkan. Selain itu juga anggota BPD perempuan di Desa Sanur Kauh seluruhnya berasal dari suku Bali, sedangkan untuk penduduk di Desa Sanur Kauh terdiri dari berbagai suku seperti suku Jawa, Madura, dan lainnya

Representasi simbolik (simbolik representation), jika wakil berdiri untuk (stands for) mereka yang diwakili namun dalam pengertian kesamaan identitas dan kebudayaan, maka ini adalah representasi simbolik. Model keterwakilan politik ini sama dengan model keterwakilan deskriptif dari Anne Philips, dimana anggota BPD

perempuan terpilih karena keinginan mereka untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan oleh anggota BPD laki – laki, hal tersebut memenuhi unsur dari representasi simbolik yaitu identitas.

5. KESIMPULAN

Keterwakilan Politik Anggota Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sanur Kauh Periode 2013 – 2019 belum sepenuhnya baik. Dimana Politic Presence Anggota BPD Perempuan secara deskriptif dan substantif yang sudah terpenuhi, sedangkan transformasi personal tidak terlaksana sepenuhnya.

Politic Presence secara deskriptif sudah terpenuhi karena sudah terdapat 3 anggota BPD Perempuan, Sedangkan Politic Presence secara substantif sudah terpenuhi karena anggota BPD Perempuan di Desa Sanur Kauh sudah berhasil menyerap dan memperjuangkan aspirasi dari perempuan yang diwakilinya, akan tetapi terdapat hambatan dimana tidak semua aspirasi dapat terealisasi dan juga proses perjuangan aspirasinya sangat sulit karena kurang mendapatkan prioritas dari anggota BPD laki – laki. Politic Presence secara transformasi personal belum terlaksana sepenuhnya karena memang kehadiran anggota BPD Perempuan di Desa Sanur Kauh mampu memberikan dampak secara pribadi terhadap perempuan, akan tetapi untuk dampak yang signifikan belum bisa terwujud yang salah satunya karena tidak adanya program yang berkelanjutan dari setiap program

yang jalan tiap tahunnya serta partisipasi perempuan yang hadir pada saat realisasi program kurang maksimal, akan tetapi secara pribadi anggota BPD perempuan memberikan dampak perubahan terhadap perempuan di Desa Sanur Kauh.

Terakhir, Representasi secara simbolik, formal dan substansi sudah terpenuhi karena definisinya sama dengan politic presence deskriptif dan substantive. Sedangkan representasi deskriptif belum terpenuhi karena anggota BPD perempuan tersebut belum bisa mewakili semua karakter perempuan di Desa Sanur Kauh, hal ini dikarenakan perempuan yang terpilih menjadi anggota BPD di Desa Sanur Kauh berasal dari kelas sosial menengah dan atas, sehingga untuk kelas bawah belum terwakilkan.

SARAN

1. Pemerintah seharusnya mengeluarkan aturan yang lebih responsif terhadap keterwakilan perempuan di BPD dengan penerapan affirmation action pemberian kuota 50% terhadap keterwakilan perempuan agar kepentingan perempuan di desa benar – benar dapat terakomodir secara maksimal.
2. Perempuan di Desa Sanur Kauh agar dapat berpartisipasi lebih maksimal dalam berbagai kegiatan dan program desa yang telah diperjuangkan oleh anggota BPD perempuan, karena dampaknya untuk perempuan itu sendiri.
3. Anggota BPD laki – laki harusnya memberi kesempatan yang sama terhadap anggota BPD perempuan

dalam menentukan aspirasi yang menjadi prioritas.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amanulloh, Naeni. (2015). *Demokratisasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Budiardjo, Miriam. (2012). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Creswell, J.W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Disain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edkins, J. dan N.V. Williams. (2013). *Teori-Teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kaelan. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Lembaga Administrasi Negara. (2008). *Kebijakan Dan Program Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Margasari, Naning. (2004). *Profil, Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Badan Perwakilan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Relasi Gender*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murniati, A. Nunuk. P. (2004). *Getar Gender Edisi Pertama*. Magelang: Indonesiatara.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Sanit, Arbi. (1985). *Perwakilan Politik Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sarwono, Jonathan. (2011). *Mixed Method*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sastropetro, Santoro. (1988). *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumnus
- Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tong, Rosemarie Putnam. (1998). *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. (Terjemahan Aquarini Priyatna Prabasmoro). Bandung: Jalasutra.

Usman, H dan Purnomo, A. (2011) *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Bumi Aksara.

Philips, Ann. (1998). *The Politics of Presence*. New York: Oxford University Press Inc.

Jurnal dan Skripsi

Muhammad Fauzi. 2016. Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Kabupaten Kubu Raya. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Sulawesi Utara.

Sundari, Any dan Rusman Nurjaman. 2016. Menilik Peluang Kepemimpinan Perempuan dalam Bingkai Demokrasi Komunitarian Desa : Ihwal Representasi Perempuan dalam BPD. *Jurnal Analisis Kebijakan*. Volume 1 Nomor 2 : 123-239.

Dimas Lukmanul Hakim. 2020. Peran BPD perempuan dalam pembangunan desa di desa Gunung Tumpeng dan Desa Bantal Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Aisah Putri Budiari. 2011. Perbandingan Peran dan Kinerja Anggota Legislatif Laki – Laki dan Perempuan dalam Proses Legislasi Undang – Undang

yang Responsif Gender. *Jurnal DPR*. Volume 16 Nomor 3.

Andila Yunika, Indah Adi Putri, Asrinaldi. 2019. Kontribusi Anggota Legislatif Perempuan terhadap Kepentingan Perempuan (Studi Kasus : Anggota Legislatif Perempuan DPRD Kabupaten Bungo Periode 2014 – 2019). *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Volume 6 Nomor 2 : 217 – 427.

Anis Maryuni Ardi. 2014. Perempuan Di Legislatif : Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur. *Jurnal Politik Muda*. Volume 3 Nomor 3 : 303 – 318

Undang-Undang

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diakses pada: www.kemendes.go.id/ Tanggal 4 Februari 2017

Permendagri No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Diakses pada: <http://binapemdes.kemendagri.go.id/> Tanggal 5 Maret 2021